MATA KULIAH PILIHAN :
RASIONAL DAN PENGADAANNYA DALAM KURIKULUM BARU FPMIPA IKIP PADANG

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 23-6-95
SUMBER/HARGA hd
KOLEKSI KKI
NO. INVENTARIS 1085/hd/95-m1(2)
KLASIFIKASI 378.199 Syu m1

Oleh

Drs. Syukri S, M.Pd.

Disampaikan pada Seminar Penelaahan Muatan Lokal
Dalam Pelaksanaan Kurikulum Baru FPMIPA
IKIP Padang Tanggal 1 September 1992

P R A K A T A

Kurikulum MIPA-LPTK yang lama kurang memberi peluang pada mahasiswa untuk memilih mata kuliah-mata kuliah yang diingininya, karena kecilnya jumlah mata kuliah pilihan yang tersedia. Akibatnya tidak terdapat variasi pengetahuan antara mahasiswa dalam jurusan dan program yang sama. Pada kurikulum baru yang disebut Kurikulum MIPA-LPTK 1990, peluang itu semakin diperbesar dengan menyediakan beberapa mata kuliah pilihan.

Masalah yang dihadapi setiap MIPA-LPTK termasuk FPMIPA IKIP Padang adalah menentukan mata kuliah pilihan itu sesuai dengan kondisi daerahnya. Makalah ini memberikan sumbangan pikiran kepada para peserta seminar dan pembaca tentang rasional mata kuliah pilihan serta cara menentukan dan mengisinya. Cara itu didasarkan pada kondisi daerah Sumatera Barat yang akan dijadikan sebagai sumber belajar dan tempat berbaktinya para lulusan FPMIPA IKIP Padang nantinya.

Isi makalah ini masih merupakan hasil pemikiran dan belum dalam bentuk yang dapat dilaksanakan. tentu saja ide dan pokok pikiran itu masih dapat diperdebatkan dan mempunyai banyak kekurangan. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca.

Syukri S

DAFTAR ISI

P r a k a t a	i
Daftar isi	ii
I. Pendahuluan	1
II. Tantangan bagi IKIP Padang	2
III. Kurikulum LPTK-MIPA 1990	4
IV. Program Pilihan	5
V. Beberapa Pertimbangan	6
VI. Penutup	9
Dafatr Pustaka	11

MATA KULIAH PILIHAN : RASIONAL DAN PENGADAANNYA DALAM KURIKULUM BARU FPMIPA IKIP PADANG *)

Oleh : Drs. Syukri S, MPd. **)

I. PENDAHULUAN

Sebagai LPTK, IKIP Padang umumnya dan FPMIPA Khususnya bertujuan menghasilkan lulusan yang profesional, yaitu yang menguasai bidang studi dan mempunyai ketrampilan dalam mengolah bahan ajar menjadi pengalaman yang bermakna bagi siswa yang diajarya (Buku Pedoman IKIP Padang, 1990 :15). Sesuai dengan perannya itu IKIP Padang telah memberikan sumbangan yang tidak sedikit kepada bangsa yaitu dalam mengisi kebutuhan tenaga kependidikan terutama di Sumbar dan propinsi-propinsi sekitarnya.

Dalam perjalanan sejarahnya, IKIP Padang telah banyak mengalami kemajuan, antara lain staf pengajar, kurikulum, sarana/prasarana serta administrasi dan pengelolaannya. Kemajuan itu dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

---

*) Disampaikan pada "*SEMINAR PENELAAHAN MUATAN LOKAL DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM BARU FPMIPA IKIP PADANG TANGGAL 1 SEPTEMBER 1992*

**) Staf Pengajar FPMIPA IKIP Padang.

Untuk mengikuti kamajuan zaman, semua lembaga pendidikan tinggi termasuk IKIP Padang dituntut bekerja lebih giat, tidak hanya untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas tetapi juga untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin berat dan sulit diramal. Oleh sebab itu IKIP Padang harus membuka mata lebih lebar, disamping melihat ke dalam juga harus memperhatikan hal-hal yang terjadi di luar dirinya. Tanpa melihat keluar, IKIP Padang akan ketinggalan dan mungkin terisolasi dari masyarakat dan akhirnya eksistensinya di masa datang akan semakin dipertanyakan orang.

Makalah ini akan mencoba memberikan sedikit sumbangan dalam rangka menjawab tantangan bagi IKIP Padang umumnya dan FPMIPA yang kita cintai ini khususnya. Pembahasannya diarahkan untuk melihat peluang bagi kita untuk memikirkan dan mengisi muatan lokal dan program pilihan seperti yang tercantum dalam kurikulum 1990.

II. TANTANGAN BAGI IKIP PADANG

Ada dua tantangan yang harus dihadapi oleh IKIP Padang khususnya dan LPTK umumnya, yaitu tantangan dari dalam dan dari luar. Tantangan dari dalam antara lain dalam meningkatkan jumlah dan kualitas staf pengajar, pengadaan sarana dan prasarana, serta membenahi administrasi dan pengelolaan.

Upaya-upaya ke arah ini telah banyak dilakukan, di antaranya pengiriman staf untuk studi lanjut ke luar atau dalam negeri, pembangunan sarana fisik, melengkapi struktur lembaga dengan perangkat-perangkatnya. Yang tidak kalah penting adalah perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk LPTK-MIPA telah lahir kurikulum 1990 yang telah kita laksanakan sejak 2 tahun lalu.

Dalam melaksanakan Kurikulum 1990, LPTK-MIPA mempunyai tugas rumah yang cukup banyak karena dihadang oleh masalah-masalah, antara lain :

- kurang terkuasanya materi kurikulum itu oleh sebagian staf pengajar LPTK-MIPA.
- kurangnya sarana-sarana pendukung yang diperlukan.
- kekurang-mampuan LPTK-MIPA dalam mengelola pelaksanaan kurikulum itu.
- kekurang-sesuaian bobot kurikulum dengan kemampuan mahasiswa yang ada di LPTK-MIPA.

Tantangan dari luar yang menghadang LPTK saat ini dan masa mendatang setidak-tidaknya ada dua. Pertama, adalah suara-suara yang menyatakan rendahnya mutu lulusan LPTK umumnya dan LPTK-MIPA khususnya. Sebagai jawabannya, semua LPTK selalu giat berupaya agar mutu lulusannya menjadi lebih baik. Kedua, adalah masalah nasib para lulusan LPTK itu sendiri.

Jumlah lulusan semakin banyak tetapi peluang mereka menjadi guru semakin kecil dari tahun ke tahun. Sementara pintu bagi lulusan LPTK untuk bekerja di luar tenaga kependidikan belum dibuka. Lapangan pekerjaan yang dapat menampung lulusan LPTK hanya ± 15 %, sedangkan lulusan non LPTK cukup tinggi yaitu sekitar 65 % (Harian. Kompas, 6-1-1992).

III. KURIKULUM LPTK-MIPA 1990

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu lulusan LPTK-MIPA adalah dengan menyusun kurikulum 1990 yang disertai dengan pelatihan staf pengajar, kunjungan staf pengajar ke luar negeri, penulisan buku ajar serta bantuan teknis lainnya. Yang unik dari kurikulum ini adalah memberi ruang gerak lebih luas kepada LPTK mengembangkan diri sesuai dengan kondisi dan daerahnya. Hal ini menunjukkan adanya kecendrungan pemerintah untuk memberikan otonomi lebih luas kepada daerah termasuk perguruan tinggi. Para ahli mengharapkan bahwa di Indonesia dimasa datang harus terjadi kompetesi antar daerah (Atar Sibero dkk. 1992).

Dalam Kurikulum 1990 yang diberikan hanya inti kurikulum yang bobotnya sekitar 80 %, sedangkan sisanya adalah wewenang LPTK masing-masing. Dalam inti kurikulum yang tercantum adalah pokok-pokok materi dalam bentuk topik-topik yang harus direka-

yasa oleh LPTK masing-masing menjadi mata kuliah-mata kuliah dengan memasukan materi non inti atau disebut juga beban lokal. Bagi LPTK yang belum mampu merekayasa seperti diatas, maka pemerintah melalui team "basic science" menawarkan suatu panduan pengembangan dan contoh kurikulum. Kemungkinan sampai saat ini sebagaian besar LPTK masih bergulat untuk memahami dan melaksanakan contoh kurikulum yang ditawarkan itu dan belum sempat memikirkan dan memasukan beban lokalnya.

IV. PROGRAM PILIHAN

Dalam Kurikulum 1990 dikemukakan bahwa mahasiswa harus mengikuti program wajib dan program pilihan. Program wajib berisi mata kuliah-mata kuliah MKDU, MKDK, MKPBM dan MKBS dengan bobot SKS yang telah ditentukan oleh LPTK bersangkutan. Program pilihan dituangkan ke dalam beberapa mata kuliah yang harus dipilih sebagian oleh mahasiswa sesuai dengan keinginannya.

Program pilihan ini di samping membuat perbedaan lulusan satu LPTK dengan LPTK lainnya, tetapi juga membuat perbedaan individual antar mahasiswa dalam satu jurusan (program). Hal ini akan terjadi jika program pilihan itu cukup banyak dan bervariasi.

Sebagai pegangan ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam menentukan program pilihan (Kur. 1990 :79);

1. mencerminkan struktur materi yang berlaku dalam bidang ilmu yang bersangkutan termasuk jalinan fungsional antar mata kuliah;
2. mencerminkan tingkat kedalaman kira-kira setara dengan pengetahuan dasar lulusan S_1 dibidang ilmunya;
3. tersusun dalam mata kuliah - mata kuliah dengan bobot SKS tertentu dan namanya sesuai dengan isi yang dicakup.

Yang menjadi masalah kita adalah bagaimana cara menentukan program pilihan ini dan merekayasanya, menjadi mata kuliah - mata kuliah yang cocok dengan daerah Sumbar. Sesuai dengan ketentuan bahwa materi program pilihan berupa :

a. pengembangan materi program wajib, baik dari inti maupun dari non inti kurikulum (Kur.1990 :114);
b. hal di luar program wajib, misalnya seni dan budaya (Kur. 1990 : 81);

V. BEBERAPA PERTIMBANGAN

Walaupun kita masih bergulat memahami dan melaksanakan contoh kurikulum dari "team basic science" tetapi sudah saatnya kita mulai memikirkan dan merekayasa inti kurikulum menjadi kurikulum yang sesuai dengan kita. Salah satu di antaranya adalah

mata kuliah pilihan. Jika tidak dimulai berarti kita menunggu dan menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Karena mereka tidak punya waktu dan tidak mampu memikirkan masalah dan kebutuhan kita di Sumbar ini. Oleh sebab itu kini adalah momen yang tepat untuk memulainya.

Sebagai langkah awal dalam memikirkan beban lokal umumnya dan program pilihan khsusunya, kita harus bertolak dari kemampuan dan kondisi kita sehingga masuk akal dan tidak muluk-muluk. Kita harus melihat tidak hanya kedalam tetapi juga keluar. Dengan melihat keluar kita hendaknya menyadari bahwa beban lokal (program pilihan)memberi sedikit bakal dan peluang bagi lulusan LPTK untuk bekerja diluar kependidikan atau berwiraswasta, karena sudah diyakini bahwa sebagian besar (85%) dari mereka tidak akan bekerja di bidang itu. Walaupun ini adalah tugas berat dan sulit, tetapi sebagai lembaga pendidikan tinggi kita harus merencanakan dan berbuat sesuatu yang diyakini sesuai dengan otonomi keilmuan.

Jika kita lihat Sumbar dari segi alamnya, ia terletak di daerah pergunungan dengan topografi yang tidak menguntungkan, sehingga hanya 12,6% yang dapat dimanfaatkan untuk ladang, sawah, perkebunan dsb. (Harian Kompas, 21-8-1992). Sektor-sektor ekonomi

yang menonjol dilihat dari pendapatan daerah adalah pertanian (31,59%), perdagangan (21,71%), angkutan dan komunikasi (11,42%) dan industri pengolahan (10,26%) (Asnawi, S dan Nurdin, A, 1992 : 3). Sektor lain seperti pertambangan, listrik dan air minum, bangunan serta bank dan keuangan masing-masing lebih kecil dari 10%. Selain PT Semen Padang dan PNTBO, Sumbar tidak memiliki industri dalam skala besar. Pemasukan lain yang agak besar adalah dari kehutanan dan hasil kayu. Komoditi eksport yang menonjol adalah hasil perkebunan rakyat (55,4%).

Pertumbuhan industri dalam menuju era industri di Sumbar relatif kecil, hanya mampu menyerap 10,17% tenaga kerja yang mencakup industri dasar, aneka industri dan industri kecil (Abad, Syafri,1992 : 3). Industri dalam skala menengah dan besar belum tanpak dan perlu dikembangkan di Sumbar. Kendala dalam hal ini adalah keterbatasan bahan baku, tingkat upah yang tinggi dan persaingan pasar. Kita tentu berharap bahwa di Sumbar dikembangkan industri Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI) di masa datang, tetapi jalan ke arah ini cukup panjang karena masalah tenaga ahli, modal, upah dan pemasaran.

Melihat kondisi Sumbar seperti di atas, maka dunia pendidikan hendaknya menghasilkan tenaga dan wiraswasta-wiraswasta yang bergerak dalam sektor-sektor yang menonjol dan mengembangkan sektor-sektor lain yang kurang atau belum ada. Hal ini adalah

salah satu tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan terutama pendidikan tinggi di Sumbar, untuk memikirkan, merancang dan melaksanakan program-program pendidikannya.

Di samping itu, kita mengetahui bahwa mobilitas penduduk Sumbar (orang Minang) paling tinggi dibandingkan penduduk daerah lainnya. Orang Minang terkenal sebagai orang perantau ke segala penjuru tanah air dan bahkan ke manca negara. Kebanyakan mereka di sana sebagai pedagang dan pegawai negeri atau swasta. Sebagai pedagang mereka terkenal sebagai pedagang kaki lima dan pedagang eceran, dan kelompok ini jumlahnya yang terbanyak. Kebanyakan mereka itu kurang (tidak) mempunyai pengetahuan tentang dunia bisnis secara modern, seperti dalam pemasaran, pengadministrasian dsb. Banyak dari mereka tidak bisa berkembang dan jatuh bangun karena kurangnya pengetahuan.

Selain itu sudah sering disebut-sebut oleh para cendikiawan bahwa Sumbar memiliki potensi manusia lebih besar dari potensi alamnya. Oleh sebab itu lembaga pendidikan mempunyai peranan yang cukup besar untuk menggali sumber ini.

VI. PENUTUP

Sebagai penutup dalam dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurikulum 1990 memberi peluang kepada LPTK-MIPA untuk memasukan beban lokal yang sesuai dengan kondisi dan daerahnya.

2. IKIP Padang hendaknya semakin banyak memperhatikan masalah-masalah di luar dirinya, yaitu masalah nasional umumnya dan Sumbar khususnya.
3. Dalam menetapkan beban lokal dan program pilihan maka masalah-masalah yang akan dihadapi oleh para lulusan LPTK hendaknya menjadi bahan pertimbangan.

1085/h.d/95. m.1(2)

378.199
Syu
m.1

DAFTAR PUSTAKA

Abad, S (1992), Peningkatan Kemampuan Rancang Bangun dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Industri Secara Mandiri (makalah), IKIP Padang.

Asnawi, S dan Nurdin, A, 1992, Pengkajian Pertanian Sumatera Barat dalam tahun 2000 an (makalah), IKIP Padang.

Kamaluddin R (1992), Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam mengikuti Perkembangan Ekonomi di Masa Depan (makalah), IKIP Padang.

Kurikulum MIPA-LPTK S_1, 1990, Dep P dan K.

Makagiansar, M (1992), Perlukah Suatu Persepsi Pendidikan Yang Baru Menjelang Abad Ke 21 (makalah), IKIP Padang.

Muin, Januar (1991), Harga Diri, Tahu Diri memacu Kemandirian dalam Era Iptek dan Globalisasi (makalah), IKIP Padang.

Sibero, A dan Nugroho, R (1992) Catatan tentang Otonomi Daerah, Harian Kompas 21 - 1 - 1992.

Harian Kompas 6-1-1992, Gejala Anakronisme Pribadi Kalangan Mahasiswa ITB.

Harian Kompas 4-12-1991, Sekolah-sekolah Terbaik di Dunia.

Harian Kompas 21-8-1992, Menemui Saya Bisa di Mana-mana.

Buku Pedoman IKIP, Padang 1990-1993.